

Lingkup Artikel Yang Dimuat Dalam Jurnal Ini Adalah Kajian Empiris dan Konseptual Kontemporer Pada Bidang Ekonomi, Bisnis & Akuntansi

Peranan Informasi Akuntansi Dalam Corporate Governance Guna Mengatasi Konflik Keagenan Dalam Bentuk Praktik Manajemen Laba Berdasarkan Kode Etik

Adonia Anita Batkunde[☆]

Abstract

Accounting information presented in the financial statements is one of the key information that is used by investors, creditors, and shareholders to assess the performance of fund managers in managing the company. As a company manager, the manager has a lot of information that can serve to benefit himself at the expense of the interests of the principal (the company owner). Businessman behavioral deviation above indicates the decline of morality and ethics of human beings, who are willing to sacrifice themselves for the benefit of the rights and interests of the various parties. This study aimed to determine the role of accounting information in corporate governance in order to address the agency conflict in the form of earnings management practices based on the code of ethics. Financial accounting system provides information that is essential for the governance mechanisms for being able to control the parties involved in the management of companies that can reduce the agency problem. Basic principles of corporate governance that need to be considered for the implementation of good corporate governance practices is transparency, accountability, fairness, and responsibility. Consistent application of corporate governance will enhance the quality of financial reporting by management companies under an obligation to comply with the various rules and accounting principles and presentation of information in a transparent manner.

Key Words :

Informasi akuntansi, corporate governance, agency problem, manajemen laba, etika bisnis

[☆] Penulis Adalah Dosen Pada Fak. Ekonomi Univ. Pattimura Ambon
e-mail: nitabatkunde@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan merupakan salah satu informasi utama yang digunakan oleh investor, kreditor, maupun pemegang saham untuk menilai kinerja manajer dalam mengelola dana perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan ekuitas yang disusun berdasarkan akrual serta laporan arus kas yang berdasarkan dasar kas. Dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun di sisi lain, dasar akrual dalam laporan keuangan dapat memberikan kesempatan kepada manajer memodifikasi laporan keuangan untuk menghasilkan jumlah laba yang diinginkan. Hal ini dilakukan mengingat laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba dapat merepresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. *Generally Accepted Accounting principles* (GAAP) atau Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) juga memberikan keleluasan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Pilihan seperti ini dapat memicu manajer untuk melakukan perilaku manajemen laba informatif atau manajemen laba oportunistik.

Bagi para pengguna, informasi laporan keuangan ini sangatlah penting karena terkait dengan pembuatan

keputusan bisnis masing-masing pengguna ke depan. Misalnya seorang investor yang akan membuat keputusan jangka panjang akan membandingkan pelaporan laba dengan kinerja aktual dengan cara berkesinambungan dan menyaring interpretasinya dari pelaporan laba oleh manajemen. Jika para manajer sebuah perusahaan secara khusus dimotivasi oleh sebuah keinginan untuk memberikan informasi bagi para investor, maka kinerja perusahaan akan sama dengan pelaporan laba oleh manajemen sehingga investor akan lebih memiliki kepercayaan terhadap pelaporan laba tersebut. Dalam hal ini, manajer berkewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Sebaliknya, jika manajer sebuah perusahaan termotivasi oleh keinginan menyembunyikan informasi dari investor, maka kinerja perusahaan akan berbeda dengan pelaporan laba yang diberikan oleh manajemen sehingga kemungkinan besar investor tidak lagi mempercayai laporan laba tersebut dan secara tidak langsung kepercayaan investor terhadap perusahaan akan berkurang. Hal ini bisa saja terjadi mengingat dalam operasional bisnis, pemilik perusahaan (pemegang saham) akan memberikan kewenangan kepada manajer untuk mengelola jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, mungkin saja manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Sebagai pengelola

perusahaan, sudah pasti seorang manajer memiliki informasi yang lebih banyak, yang tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan sehingga dengan informasi yang dimiliki, manajer bisa bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan *principal* (pemilik perusahaan). Hal ini disebut dengan teori keagenan yang mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai *principal*. Dengan kata lain, hal ini dapat memaksimalkan kepentingan manajer sendiri dengan memaksimalkan laba dan mengakibatkan adanya biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan yakni biaya agensi atau *agency costs*.

Penyimpangan perilaku pebisnis di atas mengindikasikan turunnya moralitas dan etika manusia, yang demi keuntungan dirinya rela mengorbankan hak dan kepentingan banyak pihak. Hal ini menyadarkan banyak pihak mengenai pentingnya etika dalam berkehidupan, termasuk dalam berbisnis.

Setelah melihat kondisi di atas, maka peran akuntan sangat dibutuhkan dengan melakukan pembenahan, perbaikan, dan membantu memulihkan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan cara memberikan masukan terhadap perusahaan dan manajernya. Peran serta akuntan tersebut harus diwujudkan melalui pemantapan profesionalisme serta penegakkan kode etik akuntan.

Berdasarkan latar belakang di atas, jika praktik manajemen laba ini terjadi secara terus menerus dalam suatu perusahaan tanpa ada upaya perbaikan,

maka dikhawatirkan tidak akan tercapai mekanisme *corporate governance* sehingga kepercayaan pengguna terhadap perusahaan dapat berkurang. Seperti diketahui bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan, antara lain pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan.

II. LANDASAN TEORI

Etika Bisnis dan Teori Keagenan

Istilah etika sering dikaitkan dengan istilah moral (*morales*). Etika berkaitan dengan analisis dan penerapan konsep yang membedakan perbuatan, sedangkan etika bisnis adalah salah satu studi etika yang diterapkan pada perilaku berbisnis. Konsep atau pedoman ini fokus pada standar moral yang seharusnya diterapkan dan termanifestasi dalam kebijakan organisasi, dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005). Moralitas yang dimaksud adalah aspek baik atau buruk, pantas atau tidak pantas dalam perilaku manusia pada bidang bisnis.

Menurut teori keagenan (*agency theory*), adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problems*), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer). Jensen dan Meckling (1976) memandang baik *principal* dan *agent* merupakan pemaksimum

kesejahteraan, sehingga ada kemungkinan besar bahwa *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari *principal*. Konflik ini juga tidak terlepas dari kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*) dengan mengorbankan kepentingan pihak lain, karena walaupun manajer memperoleh kompensasi dari pekerjaannya, namun pada kenyataannya perubahan kemakmuran manajer sangat kecil dibandingkan perubahan kemakmuran pemilik/pemegang saham. Hal ini didukung pula oleh beberapa hasil penelitian akuntansi positif yang menemukan bahwa manajer melakukan manipulasi laba (*earnings management*), seperti strategi *discretionary accrual* (Healy, 1985) atau strategi perataan laba (*income smoothing*) (Trueman dan Titman, 1988), untuk memperbesar kemakmurannya (Sugiri, 1998). Masalah agensi telah menarik perhatian yang sangat besar dari para peneliti di bidang akuntansi keuangan (Fuad, 2005).

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan ini dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor

agen dengan kepemilikannya yang besar. Selain itu, investor institusional dianggap *sophisticated investors* yang tidak dengan mudah bisa “dibodohi” oleh tindakan manajer (Bushee, 1998). Dan ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan direksi (*board of directors*). Beberapa penelitian empiris (Dechow *et al.*, 1996; dan Beasley, 1988) telah menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan direksi dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan direksi mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitoring proses pelaporan keuangan.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham).

Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk

bertindak oportunistik, yaitu memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer dapat melakukan manajemen laba (*earnings management*) untuk menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Tindakan *earnings management* telah memunculkan dalam beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, WorldCom dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett *et al*, 2006). Dalam kasus Enron misalnya, Satu dampak yang sangat jelas yaitu kerugian yang ditanggung para investor dari ambruknya nilai saham yang sangat dramatis dari harga per saham US\$ 30 menjadi hanya US\$ 10 dalam waktu dua minggu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa suatu perusahaan kelas dunia dapat mengalami hal yang sangat tragis dengan mendeklarasikan bangkrut justru setelah hasil audit keuangan perusahaannya dinyatakan “wajar tanpa syarat” (F. Antonius Alijoyo, 2003). Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Gideon, 2005).

Pengertian Corporate Governance

Organization of Economic Cooperation and Development-OECD (2004) dan Forum of Corporate Governance for Indonesia-FCGI (2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan

hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta peran pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Lebih jauh, Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.

Salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Pihak-pihak terkait dimaksud terdiri atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain. Idealnya pihak internal yang mungkin terdiri dari direktur, para pekerja dan manajemen akan menerima gaji dan imbalan lainnya dalam jumlah yang wajar; sementara para pemegang saham seharusnya menerima pengembalian (*return*) atas modal yang

mereka investasikan. Kreditur akan memperoleh pelunasan atas pinjaman yang mereka berikan beserta bunganya; begitu juga halnya dengan pelanggan, mereka akan dapat memperoleh barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan dengan harga yang wajar dan sebanding dengan uang yang mereka korbankan saat membeli; pemasok akan menerima pembayaran atas barang atau jasa yang mereka serahkan kepada perusahaan dan bahkan masyarakat sekitarnya pun diharapkan akan memperoleh kontribusi sosial atau bentuk-bentuk manfaat yang lainnya. Tata hubungan yang sedemikian itulah yang ingin diwujudkan oleh corporate governance.

Mekanisme (pengendalian) internal dalam perusahaan antara lain struktur kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam hal ini komposisi dewan (World Bank, 1999) Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Meskipun konsep *corporate governance* telah muncul bersamaan dengan konsep

korporasi, namun kesadaran terhadap pentingnya konsep ini baru berkembang secara cepat dalam tahun-tahun yang belakangan ini. Di awal tahun 1990an di Amerika Serikat mulai muncul berbagai inisiatif guna merealisasikan dan mengembangkan konsep ini yang ditandai dengan dipublikasikannya berbagai prinsip *good corporate governance* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan diikuti pula dengan penyebarannya dengan bekerjasama dengan Bank Dunia.

Prinsip-prinsip dimaksud terdiri dari: *Fairness*, *Transparency*, *Accountability*, dan *Responsibility*. Alinea-alinea berikut ini akan membahas prinsip-prinsip dimaksud, apa tujuan dan sarannya dan langkah-langkah yang harus diambil guna mengaplikasikannya.

1. *Fairness* (Kewajaran/Keadilan)

Prinsip 'Keadilan atau Kewajaran' ini dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan yang tidak membedakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap organisasi atau perusahaan terkait.

2. *Transparency* (Transparansi)

Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana

secara efektif. OECD menyatakan bahwa prinsip ini berhubungan dengan tersedianya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada dalam perusahaan.

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

OECD menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya.

Keempat prinsip sebagaimana diuraikan di atas, kemudian dijabarkan ke dalam lima aspek utama yang terdiri dari: 1) Hak-hak pemegang saham; 2) Perlakuan yang merata (sama) terhadap para pemegang saham; 3) Peranan pemegang saham yang harus diakui; 4) Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu; dan 5) Tanggung jawab dewan. Secara keseluruhan terdapat berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan *good corporate governance* yang terdiri dari pemegang saham, investor, karyawan, dan manajer, pemasok dan rekanan bisnisnya, masyarakat setempat, pemerintah, institusi bisnis, media, akademisi, dan pesaingnya. Masing-masing pihak ini tentu memainkan peran-peran tertentu dalam aplikasi *corporate governance*. Dalam hal ini

perusahaan harus mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak (*stakeholder*) tersebut.

Isu *corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanam tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Beberapa konsep tentang *corporate governance* antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) yang menyatakan *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Menurut teori keagenan untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan salah satunya adalah melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan, misalnya pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*bondholders*), dari perusahaan memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan kontrol terhadap manajer (Schleifer dan Vishny, 1997), yang

meliputi mekanisme internal, seperti struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif; dan mekanisme eksternal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional, dan tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*).

III. PEMBAHASAN

Peran Akuntansi Dalam Corporate Governance

Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Sedangkan *positif accounting theory* (Watts dan Zimmerman, 1990) secara implisit mengakui tiga bentuk hubungan keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen (*bonus plan hypothesis*), kreditur dengan manajemen (*debt/equity hypothesis*), dan pemerintah dengan manajemen (*political cost hypothesis*).

Masalah keagenan (*agency problem*) sebenarnya muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Menurut teori keagenan salah satu mekanisme yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan *principal* dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan keuangan. Namun karena dalam akuntansi dikenal adanya dasar akrual (*accrual basis*), yang mewajibkan perusahaan untuk mengakui pendapatan (biaya) yang sudah menjadi hak (kewajiban) dalam periode sekarang. Sehingga angka-angka dalam laporan keuangan mengandung komponen

akrual, baik yang berada dibawah kebijakan manajemen (*discretionary*) maupun yang tidak (*non discretionary*) (Sugiri, 1998). Karena adanya kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*) dan tingkat asimetri informasi yang tinggi, ditambah motif-motif tertentu, memperbesar kemungkinan manajemen memanfaatkan pos-pos akrual guna menyajikan laba yang sesuai dengan kepentingannya yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, seperti pemilik, pemegang saham, atau pemberi pinjaman.

Agency Problem lahir dari adanya pemisahan antara manajemen dan penyandang dana, dalam hal ini manajer berusaha untuk meningkatkan *incentive* mereka dalam rangka memakmurkan dirinya dan mengabaikan tugas utamanya yaitu memaksimalkan kemakmuran pemilik. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah pengeluaran untuk dirinya sebagai manajemen. Sistem akuntansi keuangan menyediakan informasi yang penting untuk *governance mechanisms*, yang membantu memecahkan masalah keagenan. Penggunaan informasi akuntansi dalam *governance mechanisms* bisa dalam bentuk implisit atau eksplisit.

Penggunaan perjanjian yang berbasiskan dasar akuntansi dalam kontrak obligasi adalah salah contoh dari penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit. Penggunaan informasi akuntansi untuk menyeleksi perusahaan yang akan dijadikan target *takeover* adalah contoh dari penggunaan informasi akuntansi secara implisit. Informasi

akuntansi keuangan merupakan produk dari proses *governance*. Informasi akuntansi keuangan dihasilkan oleh manajemen dan manajemen mengetahui informasi ini akan digunakan sebagai input dalam proses *governance*. Di bawah ini dijelaskan mengenai informasi akuntansi keuangan sebagai produk dari proses *governance*, penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit dan implisit.

✓ Informasi akuntansi keuangan sebagai produk dari proses *governance*.

Proses bagaimana informasi akuntansi lahir dan merupakan tanggung jawab difokuskan kepada kasus Amerika dan bisa aplikasikan ke negara lainnya. Proses pelaporan keuangan bagi perusahaan umumnya diatur oleh pemerintah atau sistem hukum yang berlaku (kalau di Amerika SEC). Selanjut harus mengaju pada prinsip *General Accepted Accounting Principles* (GAAP). Laporan keuangan juga akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (audit eksternal) untuk di periksa apakah dalam menyiapkan laporan keuangan sudah sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku. Perusahaan kemudian menunjuk *Audit Committee* dari keanggotaan *Board of Director*, yang mengawasi penyelesaian laporan keuangan dan berkomunikasi dengan auditor eksternal sebagai wakil dari investor.

Banyak peneliti yang mengkaji bagaimana kualitas sistem pelaporan keuangan dihubungkan dengan bentuk dan mekanisme *Governance* lainnya (diantaranya adalah La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer and Vishny, 1998; Bushman, Chen, Engel dan Smith, 2000). Penelitian lainnya juga

mengembangkan literature tentang isu lainnya yang berhubungan dengan kualitas sistim pelaporan keuangan. Literature ini di bagi atas tiga kelompok. Kelompok pertama mengkaji tentang kualitas disclosure dengan biaya modal (contoh, Lang and Lundholm, 1996; dan Botosan dan Plumlee, 2000).

Corporate governance dijadikan sebagai ukuran apakah perusahaan yang dijadikan sample trasfaran atau tidak, khususnya terhadap kreditor. Hasil penelitiannya tidak bervariasi, ada yang menemukan tingka disclosure mempengaruhi biaya hutang dan sebageian lagi tidak. Kedua adalah menguji tentang efektivitas mekanisme pengawasan spesifik terhadap proses pelaporan keuangan. Area ini termasuk kajian tentang kualitas audit (contoh, Becker, DeFond, Jiambalvo dan Subramanyam, 1998; Francis, Maydew dan Sparks, 1998) dan kualitas BOD dan Komite Audit (contoh, Beasley, 1988; Dechow, Sloan dan Sweeney, 1996; Carcello dan Neal, 2000; Peasnell, Pope dan Young, 2000). Area terakhir mengkaji sebab dan akibat gagalnya proses pelaporan keuangan penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi *earning management* (contoh, Teoh, Wong and Welch, 1998) dan *earnings manipulation* (contoh, Feroz, Park dan Pastena, 1991; Dechow, Sloan dan Sweeney 1996).

✓ Penggunaan Informasi Akuntansi secara eksplisit dalam *corporate governance*.

Penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit dalam kontrak antara manajemen dan individu atau lembaga yang memberikan dana

pada perusahaan merupakan contoh dari penggunaan informasi akuntansi dalam mekanisme *governance* khususnya penggunaan informasi akuntansi sebagai alat ukur kinerja manajemen pada kontrak mengenai sistem kompensasi untuk manajemen. Ini merupakan gambaran peran informasi akuntansi dalam mekanisme *governance*. kompensasi yang berbasis laporan keuangan hanya merupakan bagian kecil dari insentif yang ada. Insentif yang berdasarkan kenaikan harga saham cenderung sebagai dasar mereka investor untuk memberikan insentif pada manajemen (penelitian tentang isu ini telah dilakukan peneliti diantaranya adalah, Murphy, 1985; Core, Guay and Verrechia, 2000).

Berlawanan dengan literatur tentang peran informasi akuntansi dalam kompensasi diatas, penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit pada perjanjian hutang masih berlanjut. Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Smith dan Warner (1979) dan Leftwich (1983) mendokumentasikan keberadaan dan fungsi akuntansi dalam perjanjian kontrak hutang antara kreditor dan perusahaan.. penelitian pada area ini memfokuskan pada pada implikasi pemilihan metode akuntansi yang digunakan (contoh., Press dan Weintrop, 1990; Sweeney, 1994).

Tapi, peran informasi akuntansi pada kontrak keuangan telah terus berlangsung perkembangannya dan

mendapat sambutan yang mengembirakan, khususnya perjanjian peminjaman dan pelunasan hutang. Contoh penggunaan informasi akuntansi adalah berapa bunga harus dikenakan pada perusahaan didasarkan atas kekuatan keuangan perusahaan dan ini didasarkan atas data akuntansi. Data akuntansi di analisa yang dijadikan rasio-rasio keuangan dan dikelompokan atas beberapa aspek diantaranya likuiditas, solvabilitas, efektivitas dan profitabilitas.

✓ Penggunaan informasi akuntansi secara implisit dalam *corporate governance*

Penggunaan informasi akuntansi secara implisit dalam mekanisme *corporate governance* merupakan peran informasi akuntansi yang paling penting. Dalam konteks ini, valuasi dan peran akuntansi menjadi saling berhubungan. Dalam konteks bahwa investor bersedia berinvestasi pada perusahaan merupakan fungsi *information efficiency* dan tingkat likuiditas pasar modal. Sehingga, penelitian akuntansi yang berbasis pasar modal dan memfokuskan penggunaan informasi akuntansi dalam penilaian surat-surat berharga merupakan implikasi pada isu *corporate governance*. Tapi, daripada memfokuskan pada peran *governance* akuntansi melalui peranya dalam memfasilitasi *informational efficiency* harga saham. Bahkan informasi akuntansi kelihatannya secara langsung memfasilitasi jalanya mekanisme *governance* spesifik.

Penelitian empiris mendukung bahwa informasi akuntansi secara implisit digunakan dalam mekanisme *governance* yang beragam. Ada dua area paling banyak dibicarakan, kajian tentang peran informasi akuntansi dalam mekanisme *corporate governance* yaitu *legal protection* dan *large investor*. Dalam kategori *legal protection*, beberapa penelitian telah mendokumentasikan peran informasi akuntansi dalam menjalankan hak legal investor dalam melawan manajemen. Investor tidak bisa membawa masalah tersebut ke pengadilan karena manajemen telah melakukan kecurangan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh investor (pemilik).

Karena sistem pelaporan keuangan adalah mekanisme internal utama yang memberi fasilitas komunikasi antara manajemen dan investor. Penelitian mendokumentasikan bahwa masalah akuntansi dan pengungkapan sangat berhubungan dengan perkara hukum pemegang saham dan bahwa manajemen melakukan seolah-olah mereka mengatur strategi pelaporan keuangan untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan perkara hukum investor (contoh, Kellogg, 1984; Francis, Philbrick dan Schipper, 1994; Skinner 1996). Informasi akuntansi juga memainkan peran penting dalam menjalankan hak kreditor dalam kasus tidak dilunasinya hutang perusahaan atau dalam kondisi *bankrupt*.

Dalam kategori kedua, informasi akuntansi secara implisit memfasilitasi jalannya mekanisme *governance* adalah *large investor*. *Large investor* bisa mempengaruhi tindakan manajemen melalui *board of director*, yaitu otoritas untuk mempekerjakan manajemen atau memberhentikannya. Penelitian akademik menyimpulkan bahwa BOD menggunakan kinerja laba akuntansi sebagai input untuk keputusan memberhentikan manajemen (Weisbach, 1988). Tapi, dalam banyak kasus, investor yang memiliki saham besar tidak mempunyai hak suara mayoritas di dewan komisaris dan mungkin harus mengambil tindakan yang lebih drastis seperti *takeover* atau *proxy contest* untuk merebut control BOD dan mendisiplinkan manajemen. Penelitian juga menemukan bahwa pengukuran kinerja akuntansi berhubungan keputusan *takeover* (Palepu, 1986), *proxy contests* (DeAngelo, 1988), dan *institutional investor activism* (Opler dan Sokobin, 1998).

Selain penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas, banyak peneliti lain yang menguji pengaruh *institutional investor activism* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan dengan menggunakan informasi akuntansi. Secara umum melaporkan tidak ada bukti yang meyakinkan *aktivisme investor* mempengaruhi kinerja perusahaan.

Penelitian yang menemukan tidak adanya pengaruh aktivisme

investor institusi terhadap kinerja perusahaan dilakukan oleh banyak peneliti yaitu Daily, John, Elstrand dan Dalton (1996), Opler dan Sokobin's (1997), Carleton, Nelson dan Weisbach (1997) dan lain-lain. Dari penelitian-penelitian tersebut, tak seorang penelitipun berani menyimpulkan bahwa aktivisme investor institusi memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan.

Walaupun aktivisme investor institusi tidak berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, tapi aktivisme ini bisa merubah budaya perusahaan sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Seperti yang dikemukakan oleh Gordon (1997b), dan Black dan Coffee (1994). Perubahan budaya memang tidak dapat di uji secara langsung. Tapi melalui perubahan Governance yang didukung oleh institusi akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Bukti empiris menyimpulkan bahwa sudah tiga perubahan yaitu (i) perubahan komposisi dewan komisaris, (ii) komite nominasi dan kompensasi yang berasal dari dewan komisaris independen dan (iii) pemisahan posisi pimpinan dewan komisaris dengan CEO.

Investor institusi sangat mendukung yang duduk di dewan komisaris adalah komisaris independen. Tapi tidak ada jaminan dengan banyak komposisi komisaris independen dan pemisahan posisi pimpinan dewan komisaris dengan

CEO akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Klein, 2002), Brickley, Coles, dan Jarrell (1997).

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa informasi akuntansi mensuplai input yang paling penting ke dalam mekanisme *corporate governance*. Informasi akuntansi secara implisit digunakan baik untuk menunjukkan apakah aksi *governance* melawan manajemen dibutuhkan dan untuk membantu menentukan pengeluaran untuk stakeholder lainnya jika terjadi masalah hukum dan penurunan kinerja keuangan.

IV. SIMPULAN

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Sehingga dengan adanya asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka memaksimumkan *utility*nya.

Mekanisme *corporate governance* mampu mengendalikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat menekan terjadinya masalah keagenan (*agency problem*)

karena dapat menselaraskan perbedaan kepentingan atau tujuan antara pihak agen dengan prinsipal maupun pihak prinsipal (pemegang saham) dengan prinsipal lainnya (pemberi pinjaman), serta diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Mekanisme yang optimal dalam pengelolaan perusahaan akan menciptakan suatu kondisi perusahaan yang baik atau *good corporate governance*, pada akhirnya akan tercapai efisiensi dan perusahaan tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam akses permodalan. Prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik *good corporate governance* adalah; transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*), dan tanggungjawab (*responsibility*).

Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan kata lain *corporate governance* diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan manajemen laba.

Akuntansi keuangan adalah kunci utama dalam proses *corporate governance*. seperangkat lembaga dan aturan terlibat didalam proses pelaporan keuangan perusahaan, dan informasi yang disediakan oleh proses ini input penting bagi mekanisme *corporate governance*. Akuntansi keuangan merupakan aspek

penting dalam *corporate Governance*, tanpa *corporate governance* laporan keuangan menjadi kurang berperan.

Penerapan *corporate governance* yang konsisten akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Alijoyo, F., (2003). Rasio Keuangan dan Praktek Corporate Governance. <http://www.fcgi.or.id/g/rasio/keuang-an14-08-2002>.
- Beasley, M., (1988). *An empirical analysis of the relation between board of director composition and financial statement fraud*, The Accounting Review, 71, 443-466.
- Becker, C., M. DeFond., J. Jiambalvo., dan K. R. Subramanyam., (1998). *The effect of audit quality on earnings management*, *Contemporary Accounting Research*, 15, 1-24.
- Black, B.S., dan Coffee, J.C., Jr., (1994). *Hail Britannia?: Institutional investor behavior under limited regulation*. *Michigan Law Review* 92: 1997-2087.
- Botosan, C., dan M. Plumlee., (2000). *Disclosure level and the expected cost of equity capital*, Working paper, University of Utah.
- Brickley, J.A., Coles, J.L., dan Jarrell, G., (1997). *Leadership structure:*

- Separating the CEO and chairman of the board*, *Journal of Corporate Finance* 3: 189-220.
- Bushee, B., (1998). *Institutional Investors, Long Term Investment, and Earnings Management*. *Accounting Review*: 305-333.
- Carcello, J., dan T. Neal., (2000). *Audit Committee Composition and Auditor Reporting*, Working paper, University of Tennessee.
- Carleton, W.T., Nelson, J.M., dan Weisbach, M.S., (1997). *The influence of institutions on corporate governance through private negotiations: Evidence from TIAA-CREF*. Working paper. University of Arizona, Department of Finance.
- Core, J., W. Guay., dan R. Verrechia., (2000) *Are performance measures other than price important to CEO incentives?* Working paper, University of Pennsylvania.
- Cornett, M. M., J. Marcuss., Saunders., dan Tehranian, H., (2006). *Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance*.
<http://papers.ssrn.com/>
- Daily, C.M., Johnson, J.L., Ellstrand, A.E., dan Dalton, D.R., (1996). *Institutional investor activism: Follow the leaders?* Working paper. Purdue University.
- DeAngelo, L., (1988). *Managerial competition, information costs and corporate governance: the use of accounting Performance measures in proxy contests*, *Journal of Accounting and Economics*, 10, 3-36.
- Dechow, P., R. Sloan., dan A. Sweeney., (1996). *Causes and Consequences of Earnings Manipulation*, *Contemporary Accounting Research*, 13, 1-36.
- Feroz, E., K. Park., dan V. Pastena., (1991). *The financial and market effects of the SEC's accounting and auditing enforcement releases*, *Journal of Accounting Research*, 29, 107-142.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia., (2001). "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance." Seri Tata Kelola Perusahaan, Jilid II. Edisi ke 2. Jakarta.
- Francis, J., D. Philbrick., dan K. Schipper., (1994). *Shareholder litigation and corporate disclosure*, *Journal of Accounting Research*, 32, 137-164.
- OECD., (2004). "OECD Principles of Corporate Governance."